

| PRODUKSI BAJA TAHAN KARAT |

PEMERINTAH DIMINTA GELAR INTERVENSI

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia meminta pemerintah melakukan intervensi kebijakan menyusul pemangkasan produksi baja tahan karat atau *stainless steel* di Tanah Air.

Alifiah Rahmah Nurdifa
redaksi@bisnis.com

Bisnis, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia meminta pemerintah melakukan intervensi kebijakan menyusul pemangkasan produksi baja tahan karat atau *stainless steel* di Tanah Air.

Alifiah Rahmah Nurdifa
redaksi@bisnis.com

Dewan Penasehat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Djoko Widayatno mengatakan bahwa intervensi itu bisa berupa penyesuaian kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel dan penjadwalan ulang ekspansi smelter.

"Atau pengaturan ekspor terbatas, kemungkinan besar akan diperlukan untuk menstabilkan industri," katanya kepada *Bisnis*, Rabu (4/6).

Dia menilai kondisi pemangkasan produksi *stainless steel* tidak hanya terjadi pada perusahaan China, Tsingshan Holding Group, tetapi juga di berbagai smelter nikel lainnya.

Djoko mengatakan kondisi tersebut dipicu sejumlah faktor mulai dari kelebihan pasokan global, ketertarikan pasokan bijih nikel, tantangan lingkungan dan sosial, serta perubahan dalam permintaan pasar.

"Fenomena penurunan produksi smelter tidak hanya terjadi di Tsingshan/IMIP, tapi juga meluas ke beberapa smelter lain di Weda Bay, Halmahera Utara," kata Djoko.

Menurutnya, pemangkasan produksi pabrik pengolahan dan penunjam bijih tambang dalam negeri yang berdampak pada penurunan harga nikel lokal dan berujung pada tekanan bagi usaha pertambangan kecil dan menengah.

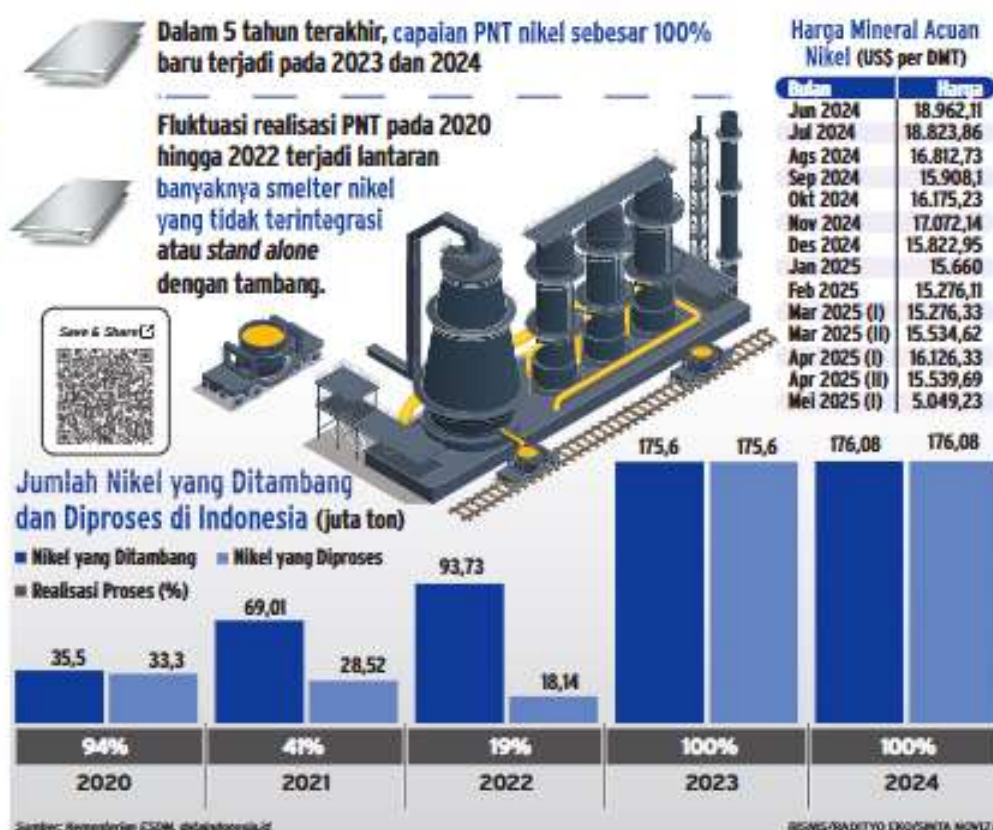
Terkait dengan pemangkasan produksi Tsingshan, dia meyakini bahwa langkah perusahaan tersebut mencerminkan upaya perusahaan menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan menjaga keberlanjutan operasional di tengah tantangan yang kompleks.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey. Dia mengatakan beberapa smelter lain juga melakukan pengurangan produksi karena ongkos produksi yang meningkat, terlebih tarif royalti yang juga baru-baru ini naik.

"Kalau sedang *shutdown production*, tidak semua. Ada beberapa line, Pertama, karena *cost* saat ini meningkat. Sejak royalti naik, harga *ore* juga jadi lebih mahal, harga *ore* juga jadi lebih mahal," tuturnya saat ditemui di acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Rabu (4/6).

Dia tak heran dengan kondisi pemangkasan produksi itu lantaran beban biaya yang terus meningkat khususnya untuk *nickel pig iron* (NPI). Sementara itu, permintaan NPI juga berkurang.

Selain kenaikan royalti, dia membeberkan, hal tersebut dilakukan karena biaya produksi meningkat. "Di mana harga juga enggak *worth it* gitu loh. Termasuk, Virtue Dragon Nickel Industry, itu juga mengurangi ya, termasuk Huadi [PT Huadi Nickel Alloy Indonesia], itu



juga mengurangi. Jadi kapasitas output produksi mungkin tahun ini berkurang ya, kalau khusus untuk NPI," katanya.

Laporan dari Bloomberg menyebutkan bahwa Tsingshan menghentikan beberapa lini produksi baja di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, mulai Mei 2025.

Berdasarkan keterangan orang yang mengetahui masalah tersebut, langkah itu diambil demi menjaga harga baja tahan karat yang mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir pada April 2025. Fasilitas produksi yang ditangguhkan telah dimasukkan masa pemeliharaan tanpa batas waktu yang jelas.

Selain itu, kurangnya bahan baku juga disebut telah menyebabkan penutupan pabrik penggilingan di Morowali.

Tsingshan yang juga merupakan top produsen nikel, disebut belum memiliki rencana pasti terkait sampai kapan penangguhan produksi baja tahan karat tersebut. Sementara itu, perusahaan tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg.

Menurut Macquarie Group Ltd, Tsingshan Holding Group menyumbang hampir sepertiga dari produksi baja tahan karat dunia tahun lalu.

Operasi pembuatan baja perusahaan di Morowali dibangun untuk memanfaatkan dominasi Indonesia dalam produksi nikel. Dibantu oleh investasi asing, termasuk dari Tsingshan, Indonesia menyumbang lebih dari setengah pasokan logam dasar dunia, termasuk nikel.

Dalam kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan

Fenomena penurunan produksi smelter tidak hanya terjadi di Tsingshan/IMIP, tapi juga meluas ke beberapa smelter lain di Weda Bay, Halmahera Utara.

mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah tambang nikel itu dianggap merusak ekosistem pariwisata kawasan tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pelaku usaha pertambangan harus menghargai bahwa wilayah Papua merupakan daerah otonomi khusus yang kearifan lokalnya tetap harus diperhatikan.

"Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemilik IUP, mau BUMN atau swasta. Kita memang harus menghargai, karena di Papua itu kan ada otonomi khusus, sama dengan Aceh," kata Bahlil.

DIEVALUASI ULANG

Dalam hal ini, Bahlil juga menegaskan terdapat beberapa aspirasi pelaku usaha untuk melakukan pertambangan dan smelter di Raja Ampat, Papua. Namun, masukan itu harus dievaluasi ulang.

Bahlil menuturkan bahwa IUP perusahaan di kawasan Raja Ampat sudah ada sebelum dirinya men-

jabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. "Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi."

Dia menerangkan bahwa tambang nikel tersebut akan disesuaikan dengan kaidah-kaidah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). "Amdalnya seperti apa, pasti kita akan ikuti kaedah-kaedah amdal ya," katanya.

Kabar kerusakan lingkungan di kawasan pariwisata Raja Ampat tersiar dari laporan NGO Greenpeace. Dalam akun Instagram resmi Greenpeace @greenpeaceid ditunjukkan gambaran kondisi keindahan alam bahari menuju hutan mangrove Teluk Bintuni yang mulai tercemar.

Greenpeace juga telah mendengar langsung cerita masyarakat adat yang berupaya mempertahankan tanah adatnya. "Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua," tulis akun tersebut.

Adapun Greenpeace Indonesia mengkritik penghiliran industri nikel yang disebut merusak lingkungan dengan membabat hutan, mencemari sumber air, sungai, laut, hingga udara.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan kegiatan usaha pertambangan nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata Raja Ampat, Papua.

Dia menegaskan industrialisasi nikel yang tengah digenot pemerintah di tengah permintaan mobil listrik yang meningkat telah mengorbankan kondisi hutan, tanah, sungai dan laut di berbagai wilayah

seperti Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi.

"Kini tambang nikel juga mengancam Raja Ampat, Papua, tempat dengan keanekaragaman hayati amat kaya yang sering dijuluki sebagai surga terakhir di bumi," kata Iqbal.

Dia juga menekankan bahwa industrialisasi nikel yang kini dijalankan akan memperparah dampak krisis iklim karena masih menggunakan PLTU *captive* sebagai sumber energi dalam pemrosesannya.

Untuk itu, aktivitas Greenpeace Indonesia bersama empat anak muda Papua dari Raja Ampat menggelar aksi damai untuk menyuarakan dampak buruk pertambangan dan penghiliran nikel yang membawa nestapa bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

Hal ini dilakukan ketika Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno berpidato di acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta.

Aktivis Greenpeace menerbangkan banner bertuliskan "What's the True Cost of Your Nickel?", serta membentangkan spanduk dengan pesan "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining".

Bukan hanya di ruang konferensi, aktivis Greenpeace Indonesia dan anak muda Papua juga membentangkan banner di exhibition area yang terletak di luar ruang konferensi.

Pesan-pesan lain yang berbunyi "What's the True Cost of Your Nickel?", "Nickel Mines Destroy Lives", dan "Save Raja Ampat the Last Paradise" terpampang di antara gerai-gerai dan para pengunjung pameran.

Melalui aksi damai itu, Greenpeace berharap dapat menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia dan para pengusaha industri nikel bahwa tambang dan penghiliran nikel di berbagai daerah telah membawa derita bagi masyarakat terdampak.

"Saat pemerintah dan oligarki tambang membahas bagaimana mengembangkan industri nikel dalam konferensi ini, masyarakat dan bumi kita sudah membayar harga mahal," tuturnya.

Greenpeace telah menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Maruan dari sebuah perjalanan menelusuri Tanah Papua pada tahun lalu.

Padahal, ketiga pulau itu termasuk kategori pulau-pulau kecil yang sebenarnya tak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut analisis Greenpeace, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas. ■